

Jakarta, 1 April 2020

Rilis

“Catatan FITRA atas Pidato Presiden tentang Langkah Perlindungan Sosial & Stimulus Ekonomi Menghadapi Dampak Covid-19”

Oleh: Misbah Hasan Sekretaris Jenderal FITRA
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

Pertama, kami apresiasi komitmen pemerintah menyediakan anggaran covid-19 cukup besar, sekitar Rp 405,1 T, tapi ini bukannya tanpa resiko. Resiko pertama, terkait penyediaan besaran anggaran tsb. saat ini realisasi Pendapatan Negara baru mencapai 216,6 T (9,7% dari target APBN). Ini artinya, kas negara sedang minim). Belum lagi per Maret 2020 Belanja Negara sudah mencapai Rp 279,4 T.

Kedua, pemerintah mengandalkan SiLPA APBN tahun lalu yang sebesar Rp 46,4 T. Ini jelas tidak mencukupi. Apalagi kondisi perekonomian yang terkoreksi saat ini, misal dari aspek penerimaan perpajakan, PNB, dll. Pemerintah musti mencari pendanaan dari sumber lain. Utang sepertinya akan menjadi alternatif pertama. Hal ini terlihat dari perubahan defisit anggaran yang dibuka di atas 3%. Ini yang harus dikontrol juga. Jangan sampai kebijakan utang akan menimbulkan masalah di tahun-tahun berikutnya. Pun tetap menggunakan alternatif utang, maka sebaiknya pemerintah lebih memaksimalkan mekanisme utang swasta dalam negeri.

Ketiga, Dg besaran anggaran yg disediakan, pasti rentan penyimpangan. Untuk itu, pemerintah harus menyediakan media informasi pelaksanaan anggaran yang bisa dipantau oleh masyarakat setiap saat. Organisasi Masyarakat Sipil juga bisa melakukan audit sosial terhadap pelaksanaan penanganan covid-19 ini nantinya. Peran lembaga pengawas sangat krusial dalam monitoring dan audit pelaksanaan penanganan covid-19. Audit yang dilakukan oleh APIP, BPK, dan KPK harus dipublikasikan kepada masyarakat.

Informasi terkait proses dan mekanisme realokasi anggaran juga penting disampaikan kepada publik. Seperti anggaran bersumber dari mana? Diperuntukan untuk apa? Dan bagaimana pertanggungjawabannya?

Termasuk memberikan kejelasan sumber Alokasi 405,1 T.

Sementara ini, pemerintah telah menginformasikan alokasi anggaran 255,1T dr penghematan belanja K/L, TKDD dan realokasi dana Bencana. Tersisa 150T, pemerintah perlu yg menginformasikan sumber anggarannya.

Jadi informasi yang disampaikan oleh Gugus Tugas Covid-19 dan K/L pendukung tidak hanya jumlah korban, tapi penggunaan anggaran hingga saat ini berapa dan untuk apa saja.

Keempat, Utk daerah, kondisi fisalnya tidak jauh berbeda dengan pusat, apalagi daerah masih sangat tergantung fisalnya dari transfer pusat, DAU, DAK, DBH, Dana Desa. Proporsinya rata2 hingga 70-80% untuk Kab/Kota seluruh Indonesia. Kalau hanya mengandalkan PAD, saya yakin daerah tidak mampu. Untuk itu, realokasi Belanja

Barang/Jasa dan Belanja Modal sangat penting, misalnya: Jasa Perkantoran, ATK, Belanja Perjalanan Dinas, Makan Minum, dan program-program yang tidak prioritas musti dipangkas untuk penanganan covid-19.

Kalau hitungan FITRA, berdasarkan APBD Realisasi 2018 Provinsi/Kab/Kota seluruh Indonesia, kalau Belanja Barang/Jasa-nya direalokasi sebesar 30%, akan tersedia anggaran sebesar Rp 79,2 T, sedangkan untuk realokasi Belanja Modal hingga Rp 60,9 T.

Kelima, Intinya, transparansi alokasi dan realokasi anggaran penanganan covid-19 sangat penting, demikian juga akuntabilitas penggunaannya.

CP:

Misbah Hasan Sekretaris Jenderal FITRA ([0822-1171-3249](tel:0822-1171-3249))